

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Gautama, Sudargo dan Ellyda T. Soetijarto, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2005)
- Jayadinata, Johara T, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*, (Bandung : ITB, 1999)
- Kartasapoetra, G, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta : PT. Bina Karsa, 1985)
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penataan Ruang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016)
- Sasono, Adi dan Ali Sofyan Husein, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Sumardjono, Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi Edisi Revisi*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997)
- Isa, Iwan, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*, (Jakarta : Badan Pertanahan Nasional, Prosiding Balai Penelitian Tanah, 2004), halaman. 8-9

### Jurnal :

- Silvia Anggraini Yusmi, *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kabupaten Tegal*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016), Halaman 88.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA)
3. Undang - Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
6. Undang - Undang Nomer 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
7. Undang - Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Undang - Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan
9. Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
12. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Negara
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590 / 107 / 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Yang Tidak Terkendali Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

15. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

**Wawancara :**

1. Djoko Sutrisno, *Wawancara*, Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, Badan Pertanahan Nasional , (Semarang: 27 Maret 2019, Pukul 10.00)
2. Mujiono, *Wawancara*, Bagian Sarana Prasarana, Dinas Pertanian, (Semarang: 21 Februari 2019, Pukul 10.00)
3. Ikhsan Hidayat, *Wawancara*, Real Estate Indonesia (REI), Ketua II DPD REI Jawa Tengah, (Semarang: 14 April 2019, Pukul 14.00)